RENCANA AKSI KINERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

TAHUN 2021

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka integrasi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja). Rencana kerja adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju.

Program dan kegiatan di dalam Renja meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru. Lokasi kegiatan merupakan lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Indikator kinerja terdiri dari indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/ atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program dan indikator kinerja kegitan yang memuat ukuran spesifik secra kuantitatif dan/ atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan. Kelompok sasaran memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan.

Sebagai salah satu bentuk perencanaan yang disusun secara berkala, maka proses penyusunan Rencana Aksi diperlukan untuk dapat melakukan breakdown terhadap rencana pencapaian target dan kinerja yang telah disusun di dalam Renja. Hal ini diperlukan sebagai upaya untuk dapat memfokuskan Rencana Anggran Biaya yang telah ditentukan melalui PPAS sehingga diharapkan kinerja yang menjadi target secara terukur dapat dievaluasi pencapaiannya melalui langkah monitoring dan evaluasi secara berkala.

B. TUJUAN

Sebagaimana telah dirumuskan di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, maka Tujuan Pembangunan yang menjadi focus DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah dalam rangka mencapai " Menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pembangunan industry di berbagai sector yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan "sebagi turunan dari Misi Pertama Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2021-2026.

C. SASARAN DAERAH

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing.

Guna mencapai tujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pembangunan industry di berbagai sector yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan, maka sasaran pembanguann yang harus dicapai adalah "Tercptanya Iklim Usaha yang Kondusif dan Kemudahan Investasi".

D. INDIKATOR SASARAN DAN TARGET KINERJA

Sebagai tolak ukur pencapaian kinerja terhadap pelaksanaan seluruh program dan kegiatan sesuai urusan yang diemban tiap-tiap Perangkat Daerah, maka berdasarkan tiap sasaran strategis jangka menengah, telah ditetapkan Terget Indikator Kinerja tahun 2021 pada Sasaran Pembangunan di atas sebagi berikut :

- 1. Indeks Kepuasan Masyarakat
- 2. Rata-rata waktu layanan izin
- 3. Jumlah pengaduan masyarakat
- 4. Nilai investasi PMA/ PMDN
- 5. Jumlah pengawasan perusahaan yang diawasi dan dikendalikan
- 6. Jumlah kajian potensi dan peluamh usaha kabupaten
- 7. Jumlah calon investor
- 8. Jumlah total perizinan dan non perizinan yang ditertibkan
- 9. Jumlah sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterapkan

No	SASARAN KINERJA	IKU OPD	TARGET	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM) Layanan Perizinan	Nilai A	A
2	Meningkatnya Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	162 M	1.048 T

E. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Untuk dapat merealisasikan capaian kinerja sesuai dengan target pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2021, maka terdapat 6 (Program),

11 Kegiatan dan 27 Sub kegiatan:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

• Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penysunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

- Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

• Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

• Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

• Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya

- Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

• Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

• Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

• Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

• Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

• Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

• Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

• Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

• Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

• Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

•

- Kegiatan : Pemelihraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

• Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

• Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

• Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

• Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan : Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota

3. Program Promosi Penanaman Modal

- Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan

Daerah Kabupaten/ Kota

• Sub Kegiatan : Penyusuann Strategi Promosi Penanaman Modal

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/

Kota

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

- Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang

Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

• Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis

Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

• Sub Kegiatan : Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman

Modal

• Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

• Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Intensif Daerah

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan

Daerah Kabupaten/ Kota

• Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

• Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

• Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang

Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

• Sub Kegiatan : Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan

Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi

secara Elektronik

			T/	ARGET	KINER	!JA	PROGRAM,	INDIKATOR									JADV	WAL	KEGIA	ATAN	ſ		
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SASA	ARAN		KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB	TARGET	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB		ΓR 1		,	TR 2		TR	3		TR 4	ļ
			TR 1	TR 2	TR 3	TR 4		KEGIATAN					1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12
1	2	3			4		5	6	7	8	9	10				•			11				
				V		V	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai IKM			4.673.314.438,00												
							Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			4.472.914.688,00												
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	√	√	√	√	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perencanaan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja			4.769.000,00				√			√		1			√
			√	V	V	٧	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Perangkat Daerah	Ranwal Renstra, Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, Renstra, Ranwal Renja, Rancangan Renja, Rancangan Akhir Renja,			4.769.000,00	Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Progarm (PPTK)			√			√		√			√
			V	√	√	√	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksannya Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.597.485.138,00												

						1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN	24 Dokemen	3.474.125.138,00	√	V	V	√	√	V	√	√ ¬	V	√	√	√
		√	√	√	V	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	123.360.000,00	√	V	V	1	V	V	√	√ ×	√	√	√	V
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggara nya Administrasi Kepegawaian dengan Baik		24.000.000,00												
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanny		24.000.000,00	√	1	√	√	√	√	√	V	V	√	√	√
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Kelancaran Penyelenggara an Administrasi Perangkat Daerah		330.640.550,00												
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	1.999.268,00	V	V	√	√	√	√	√	√	√	V	√	√
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Bulan	72.595.282,00	√	V	V	√	V	V	√	V	V	√	√	√
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Kebutuhan Makan Minum Rapat	12 Bulan	18.990.000,00	√	√	√	√	√	√	√	√ ¬	√	√	√	√
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	8.872.000,00	√	1	√	√	√	V	√	√ ¬	√	√	√	√
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	12 Bulan	10.000.000,00	√	V	√	√	√	V	√	√ ¬	√	V	V	√

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedinya Biaya Rapat / Konsultasi	12 Bulan	218.184.000,00	V	√	√	√	√	V V	√	√	√	√	√
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Terpenuhinya Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor		448.650.000,00											
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	1.650.000,00	V	√	√	V	√	V V	√	√	V	√	√
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedinya Jasa Pemakaian Telpon, Air dan Listrik	12 Bulan	66.000.000,00	√	√	√	V	√	V V	√	√	√	√	V
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	381.000.000,00	V	√	√	V	√	√	√	√	√	√	√
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Barang Milik Daerah		67.370.000,00											
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dilakukan Pemeliharaan dan Pembayaran Pajaknya	2 Unit	43.020.000,00	√	V	V	√	√	N N	1	√	√	V	V
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dilakukan pemeliharaan dan pemabayaran pajaknya	14 Unit	17.760.000,00	√	V	√	√	V	N N	√	V	V	V	٨
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksannya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		4.590.000,00	√	√	√	√	√	V V	√	√	√	√	√

							Pemeliharaan/ Rehap Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedinya Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			2.000.000,00		 √	√	√	√	√	√	√	√ ·	V	√	√
			1	1	√	1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kebijakan Peningkatan Penanaman Modal			4.200.000,00												
							Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Tersedinya Peta Potensi Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat			4.200.000,00												
							1. Penyediaan Peta Potensi dan Pelauang Usaha Kabupaten/ Kota	Tersedianya data/ Informasi Pengembangan Penanaman Modal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1 Dokumen	Persiapan rapat penyediaan makanan dan minuman, cetak buku laporan kegiatan	4.200.000,00							√	√		√ √	√	
2	Meningkanya Investasi di Daerah	Peresentase Peningkatan Investasi				V	Progarm Promosi Penanaman Modal	Jumlah Calon Investor			45.900.000,00	Kabid Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi											
				V		V	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Daerah sesuai Strategis yang di rencanakan			45.900.000,00	Penanaman Modal											
							Penyusunan Strategis Promosi Penanaman Modal	Tersedianya Dokumen Strategis Penanaman Modal	1 Dokumen	Persiapan Rapat Penyediaan makanan dan minuman, cetak buku laporan Keikut sertaan	2.875.000,00					·		√	√		1	√	
						V	2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksannya Promosi Potensi dan Peluang Investasi	1 Pameran Investasi	Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan kegiatan Pameran Investasi	43.025.000,00						√		√	√ .	√ √	√	

	√	√	√	V	Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Produk Perizinan (Jumlah Jenis/ Kelompok Izin)			100.199.750,00												
					Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapann ya			100.199.750,00												
					Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Proses Pelayanan Peneribitan Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik	2 Laporan	Cetak Laporan IKM, rapat penyediaan makan dan minum, sewa hosting survey, upgrade sistem informasi	17.637.500,00	Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan dam Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan						√					√
					2. Pemantauan Pemenuhan Komitemen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Permohonan Perizinan dan Non Perizinan yang divalidasi dan di verifikasi	2500 Izin	Cetak kegiatan inovasi layanan, cetak kegiatan pemeriksaan, makan minum kegiatan pemeriksaan perizinan dan non perizinan, makan minum kegiatan inovasi layanan, makan minum kegiatan investasi perizinan dan non perizinan	50.100.000,00		√	√	√	√	√	V	√ \ \	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	√	٧	√
					3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyrakat terhadap Palayanan	Jumlah Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan yang ditindaklanjuti	4 laporan	Cetak laporan, rapat penyediaan makan dan minum, iklan spot radio, pengadaan pakaian dinas	20.150.000,00				√			√		٧			₹

		Terpadu Perizi dan Non Periz			lapangan							
		4. Koordinasi Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Inse Daerah	Hukum Pemberian Fasilitas	3 Produk Hukum	Cetak himpunan peraturan, rapat makan dan minum, penyediaan produk hukum	12.312.250,00			V	1		√
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			32.040.000,00						
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ K	Meningkatnya Pemahaman Pelaku Ushaa Terhadap Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal		Persiapan	32.040.000,00						
		1. Koordinasi Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman M	Infoemasi Perkembangan Realisasi	1 Laporan	Rapat, Penyediaan Makan dan Minum Rapat, Analisis dan Rekapitulasi Data Penanaman Modal, Pemantauan ke Lokasi Usaha	14.300.000,00	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanamna Modal dan Sistem Informasi		√	1	V	√
		2. Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman M	Bimbingan Teknis Aturan Ketentuan Pelaksnaaan Penanaman Modal terhadap pelaku Usaha	2 Kali	Persiapan Rapat, Penyediaan Makan dan Minum rapat, Pelaksanaan Bimtek, Penyusunan Laporan, Pembinaan Perusahaan	13.665.000,00		√	√	1	V	√
		3. Koordinasi Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman M	Perusahaan yang dilakukan Pengawasan	12 BAP	Persiapan Rapat, Penyediaan makan dan minum rapat,	4.075.000,00			√	1	√	√

			Penanaman Modal		pengawasan ke lokasi usaha, penyusunan laporan									
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya Kualitas Sistem Perizinan berushaa terintegrasi secara Elektronik			18.060.000,00								
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penerapan Perizinan Berushaa Terintegrasi Secara Elektonik			18.060.000,00								
		1. Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatam Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terinte grasi secara Elektronik	1 Laporan	Analisis Data: Persiapan Rapat, Penyediaan Makan dan Minum Rapat, Pengelolaan Sistem Informasi Perizinan berbasis elektonik, Penyusunan Laporan	18.060.000,00		√		√	√		√	